

“Kalau ekologis butuh tobat, siapa yang harus tobat duluan?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

Pembuka. Pekan ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia, dan seorang menteri Indonesia menyerukan "Tobat Ekologis" sebagai kerangka untuk merespons krisis lingkungan. Seruan ini ditanggapi beragam — sebagian publik mengapresiasi, sebagian lain mempertanyakan dengan tajam: kalau ekologis butuh tobat, siapa yang harus tobat duluan? Cuitan-cuitan kritis menggugah, salah satunya menangkap paradoks struktural dengan kasar tetapi akurat: "Hutan kita gundul, tapi dompet rakyatnya pada gersang. Terus kayu sebanyak itu larinya kemana ya?" Di balik pertanyaan ini berdiri pertanyaan struktural yang lebih dalam: dalam krisis lingkungan, siapa yang

punya tanggung jawab moral terbesar dan bagaimana redistribusi tanggung jawab seharusnya dilakukan? Empat lensa yang biasa ditawarkan untuk menjawab — individualis-konsumen, strukturalis-kapitalis, fungsi-pemerintahan, dan kerangka ekologi-aqidah — semuanya benar sebagian, dan semuanya bisa dibantah dari sudut yang berbeda. Pembahasan di bawah memetakan keempatnya berikut titik lemahnya masing-masing.

Lensa pertama — individualis-konsumen. Argumen pendukung pendekatan individual: kerusakan lingkungan adalah akumulasi pilihan konsumsi individu. Setiap kresek plastik yang dipakai sekali, setiap botol air yang dibuang, setiap watt listrik yang diboros — semuanya akumulasi menjadi krisis. Solusinya dimulai dari individu yang berubah kebiasaan: zero waste lifestyle, hemat energi, transportasi ramah lingkungan. Tobat ekologis dimulai dari diri sendiri. Implikasinya: edukasi konsumen yang masif, kampanye kebiasaan ramah lingkungan, dan tanggung jawab personal yang ditekankan. Tetapi lensa ini punya celah serius. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar emisi karbon dan kerusakan lingkungan struktural berasal dari korporasi besar (industri ekstraksi, manufaktur, agribisnis), bukan konsumsi individu. Memfokuskan pada individu tanpa mengkritisi struktur bisa menjadi distraksi dari sumber masalah yang lebih besar. Pertanyaan: bagaimana keseimbangan antara tanggung jawab individu yang nyata dan kritik struktural yang juga penting?

Lensa kedua — strukturalis-kapitalis. Argumen ekonom kritis: krisis ekologis adalah produk struktural dari sistem kapitalisme global yang menempatkan pertumbuhan tak terbatas di atas kelestarian. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh korporasi multinasional, kebijakan konsesi hutan yang melayani konglomerat, regulasi lemah yang membiarkan polusi industri — semuanya struktur yang tidak bisa diubah oleh konsumen individu. Tobat ekologis yang substantif harus

mencakup reformasi struktur — termasuk regulasi yang lebih kuat, redistribusi keuntungan dari eksploitasi sumber daya, dan transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan. Tetapi lensa ini juga punya celah. Kritik strukturalis sering kali abstrak — sulit diterjemahkan ke tindakan konkret untuk individu sehari-hari. Selain itu, mengandalkan reformasi struktural dari pemerintah yang sering tunduk pada kepentingan korporasi adalah ekspektasi yang terlalu optimistis. Pertanyaan: bagaimana mendorong reformasi struktural sambil tetap berikhtiar di tingkat individu yang konkret?

Lensa ketiga — fungsi-pemerintahan. Argumen kebijakan publik: krisis lingkungan adalah konsekuensi kegagalan pemerintahan dalam menjalankan fungsi regulator. Undang-undang lingkungan ada, tetapi penegakannya lemah. Kementerian lingkungan ada, tetapi anggarannya kecil dibanding kementerian yang melayani industri ekstraksi. Inspektur lingkungan ada, tetapi mudah dikompromi. Tobat ekologis pemerintah yang sebenarnya harus mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, transparansi konsesi, dan independensi institusi pengawas dari intervensi politik. Implikasinya: solusi struktural melalui jalur pemerintahan — dorongan legislatif, advokasi kebijakan, akuntabilitas politik. Tetapi lensa ini juga punya celah. Pemerintahan Indonesia, seperti banyak negara berkembang, terjebak dalam kompromi politik yang sulit diurai. Banyak inisiatif lingkungan dari pemerintah menjadi tidak konsisten — tergantung siapa yang berkuasa dan kepentingan koalisi politik. Pertanyaan: bagaimana mendorong reformasi pemerintahan tanpa naif tentang batasan struktural politik yang ada?

Lensa keempat — kerangka ekologi-aqidah. Argumen ulama kontemporer: krisis ekologis adalah krisis spiritual — kehilangan kerangka aqidah yang menempatkan lingkungan sebagai amanah Allah. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di bumi dengan tanggung jawab merawat ciptaan Allah. Tetapi modernitas dengan etika utilitarian-konsumeristik mengikis kerangka ini, sehingga manusia melihat alam sebagai sumber daya yang boleh dieksploitasi tanpa batas. Solusinya: revitalisasi kerangka khalifah — pendidikan aqidah ekologi sejak dini,

ekonomi syariah yang mengakui batas kelestarian, dan etika konsumsi yang dibatasi oleh prinsip israf (boros) dan tabdzir (membuang-buang). Tetapi lensa ini juga punya celah. Kerangka khalifah sangat indah dalam teori, tetapi sering kali sulit diterjemahkan ke kebijakan publik di negara plural seperti Indonesia. Selain itu, banyak Muslim sendiri yang dalam praktik tidak menjalankan kerangka ini — bahwa konsumsi muslim modern sering sama borosnya dengan non-muslim. Pertanyaan: bagaimana membuat kerangka aqidah ekologi menjadi praksis nyata, bukan hanya retorika di mimbar?

Sintesis yang tidak selesai. Keempat lensa tidak saling meniadakan; setiap lensa menangkap satu dimensi dari fenomena yang multidimensi. Yang lemah dari satu lensa biasanya diisi oleh kekuatan lensa lain — individu yang berubah tanpa struktur yang mendukung tetap minoritas; struktur yang berubah tanpa kesadaran individu rentan dirusak ulang; pemerintahan yang efektif tanpa kerangka spiritual yang dalam mudah dikompromi; kerangka spiritual tanpa praksis konkret menjadi retorika. Tidak ada satu pun lensa yang berdiri sebagai jawaban tunggal. Inilah kerumitan tobat ekologis: ia adalah masalah multidimensi yang membutuhkan respons di empat tingkat sekaligus.

Penutup. Pertanyaan poster — "kalau ekologis butuh tobat, siapa yang harus tobat duluan?" — sengaja dibiarkan terbuka karena jawabannya bukan satu kalimat. Jawabannya adalah perdebatan empat lensa di atas. Yang penting bukan menemukan urutan tobat yang tunggal, melainkan memahami bahwa tobat ekologis adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan individu, struktur ekonomi, pemerintahan, dan kerangka spiritual sekaligus. Generasi yang akan menjadi pejabat lingkungan, eksekutif perusahaan, akademisi, dan aktivis dalam dua dekade ke depan akan diuji oleh kemampuan memegang lebih dari satu lensa sekaligus.

| Pertanyaan

Q · 01

"Saya cuma satu individu — apa pengaruh saya kalau industri besar yang menyebabkan kerusakan?"

A

Pushback ini valid secara statistik — emisi karbon satu individu sangat kecil dibanding korporasi. Tetapi ada tiga hal yang harus dipikirkan. Pertama, di hadapan Allah, yang dinilai bukan dampak struktural — yang dinilai adalah ikhtiar dan niat. Pilihan ekologis kita dihitung walaupun struktur tidak berubah karenanya. Kedua, perubahan struktural sebenarnya akumulasi dari ribuan keluarga yang berubah konsumsi — itu yang menggerakkan industri merespons. Ketiga, individu adalah pemilih, konsumen, pekerja, suara publik — empat peran yang semuanya bisa mempengaruhi struktur. Mahasiswa hari ini akan menjadi pejabat, profesional, dan pemimpin opini esok. Pilihan kalian sebagai mahasiswa membentuk siapa kalian sebagai pemimpin nantinya.

"Kalau pemerintah yang harusnya tobat duluan, kenapa kita yang harus berkorban kenyamanan?"

A

Pushback ini menarik karena mengangkat dimensi keadilan moral. Memang tidak adil kalau rakyat kecil yang harus berkorban sementara korporasi dan elite politik tetap nyaman. Tetapi ada perangkap dalam logika ini. Pertama, kalau kita menunggu pemerintah tobat duluan, kita mungkin akan menunggu selamanya — sementara kerusakan terus berlangsung. Kedua, individu yang konsisten berubah membangun kapital moral untuk menuntut pemerintah berubah. Kalau kita sendiri boros listrik dan mengeluh pemerintah lambat soal energi, kritik kita kekurangan otoritas. Ketiga, perubahan dari bawah ke atas adalah pola sejarah yang nyata — banyak reformasi lingkungan global dimulai dari gerakan akar rumput.

"Apakah konsumerisme adalah masalah moral atau ekonomi struktural?"

A

Keduanya, dengan kerangka yang berbeda. Secara struktural, konsumerisme adalah fitur sistem ekonomi yang membutuhkan pertumbuhan tak terbatas untuk berfungsi. Tetapi di tingkat individu, partisipasi kita dalam konsumerisme adalah pilihan moral — apakah kita membeli karena kebutuhan riil atau karena tekanan sosial dan iklan? Islam memberikan kerangka yang seimbang: israf (boros) dan tabdzir (membuang-buang) adalah dosa, tetapi konsumsi yang wajar untuk kebutuhan adalah hak. Jadi kerangka moral Islam menolak konsumerisme ekstrem tanpa mendukung asketisme yang menolak material sama sekali. Yang dibutuhkan: kemampuan kritis untuk membedakan kebutuhan dari keinginan, dan kerangka spiritual yang menjaga keseimbangan.

"Kalau saya jadi insinyur lingkungan di perusahaan ekstraksi yang menyebabkan polusi, apakah pekerjaan saya halal?"

A

Pertanyaan kompleks yang tergantung detail. Bedakan dulu: apakah Anda bekerja di tim yang langsung menyebabkan polusi (operasi pabrik, ekstraksi), atau di tim yang justru mengurangi dampak (environmental compliance, water treatment, sustainability reporting)? Yang kedua justru dianjurkan karena Anda menjadi voice internal yang mendorong perbaikan. Yang pertama lebih lentur — banyak ulama kontemporer mengatakan kalau tidak ada alternatif, bisa diteruskan sambil sisihkan infaq untuk lingkungan sebagai pembersih, tetapi tetap mencari opsi karir yang lebih bersih. Yang penting: jangan jadi insinyur lingkungan yang hanya stempel — kalau pekerjaan Anda menjadi fasade untuk perusahaan yang sebenarnya merusak, itu masuk dalam kategori membantu dosa.

"Bagaimana mahasiswa dengan modal terbatas bisa hidup ramah lingkungan ketika produk ramah lingkungan biasanya lebih mahal?"

A

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, produk ramah lingkungan tidak selalu lebih mahal — banyak kebiasaan ramah lingkungan justru menghemat uang (membawa tas belanja sendiri, minum air keran daripada beli botolan, mengompos sampah). Kedua, kalau ada produk yang memang lebih mahal (organik food, sustainable fashion), prioritaskan yang impact-nya besar dan abaikan yang impact-nya kecil. Lebih baik sekali sebulan beli sayur organik dari petani lokal daripada setiap hari fashion sustainable yang harganya luar biasa. Ketiga, gunakan platform second-hand dan komunitas barter — banyak kebutuhan bisa dipenuhi tanpa membeli baru. Keempat, kalau memang tidak mampu konsumsi ramah lingkungan, fokus pada pengurangan konsumsi keseluruhan — minimalisme adalah jalur ekologis yang murah.